

BUNGA RAMPAI
ISU-ISU STRATEGIS PENDAPATAN
DAN PEMBIAYAAN NEGARA

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2018

BUNGA RAMPAI ISU-ISU STRATEGIS PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN NEGARA

Cetakan Pertama, November 2018

ISBN: 978-602-50563-5-2

Copyright @ 2018

Pusat Kajian Anggaran

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si

Penulis

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E, MM

Robby Alexander Sirait., S.E., M.E.

Matius Winarno, S.E., MAB

Mujiburrahman, S.E., M.Si

Iranisa, S.E., M.Acc

Hikmatul Fitri, S.E., M.Sc

Deasy Dwi Ramiayu, S.E

Anisa Fitria Wulaningtyas, S.E

Penyunting & Desain Sampul

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin

DAFTAR ISI

Potensi dan Strategi Penerapan Pajak Pada Sektor <i>E-Commerce</i> di Indonesia	1
Pendahuluan.....	1
Model dan Skema Pajak <i>E-Commerce</i>	4
Potensi Penerimaan Pajak <i>E-Commerce</i>	7
Penerapan Pajak <i>E-Commerce</i> di Negara Lain.....	9
Strategi Optimalisasi Pajak <i>E-Commerce</i>	11
Penutup.....	13
Kondisi Sektor Pertambangan Menjelang Satu Dekade Diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara	17
Pendahuluan.....	17
Sejarah Pengelolaan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.....	20
Perkembangan Amandemen Kontrak.....	21
Potensi Sektor Mineral dan Batubara Indonesia.....	22
Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia di Mata Dunia.....	23
Investasi Sektor Pertambangan Minerba.....	24
Produksi Minerba.....	27
Penerimaan Negara Sektor Pertambangan Minerba.....	30
Penutup.....	35
Upaya Dan Kendala Mewujudkan Komitmen Diversifikasi Energi Listrik Tenaga Panas Bumi Sebagai Sumber Penerimaan Negara	39
Pendahuluan.....	39
Penerimaan Negara dari Aktivitas Pertambangan dan Produksi Uap Panas Bumi Terus Meningkat.....	41
Komitmen Pemerintah dalam Peningkatan Pemanfaatan Energi Panas Bumi.....	43
Kendala Peningkatan Pemanfaatan Panas Bumi.....	52

Kritik Lain terhadap Upaya Peningkatan Pemanfaatan Panas Bumi.....	56
Penutup.....	59
Kinerja BUMN Perbankan:	63
Tantangan Peningkatan Penerimaan Negara	63
Pendahuluan.....	63
Kinerja BUMN Perbankan.....	67
Kinerja BUMN Perbankan RI di ASEAN.....	77
Konsolidasi BUMN Perbankan Sebagai Jalan Keluar?.....	81
Penutup.....	87
Tantangan Peningkatan Peringkat <i>Investment Grade</i> Untuk Indonesia Dalam Menurunkan Beban Bunga Surat Utang Negara (Sun)	91
Pendahuluan.....	91
<i>Credit Rating</i>	93
Kinerja Peringkat Utang Indonesia.....	94
Surat Utang Negara.....	97
Kinerja Biaya Bunga SUN Januari 2017 - Januari 2018.....	99
Kinerja Biaya Bunga SUN Tahun 2018 Ditengah Dampak Global.....	104
Faktor Determinan Domestik yang Berdampak Pada Minat Investor Pada Instrumen SUN yang Perlu Mendapat Perhatian Pemerintah.....	110
Penutup.....	114
Peluang Pembiayaan Berbasis Syariah Untuk Pembangunan Proyek Infrastruktur Di Indonesia	119
Pendahuluan.....	119
Pembiayaan Proyek Infrastruktur Berbasis Syariah: Jalan Baru Yang Mulai Diterapkan.....	122
Perkembangan Sukuk Negara Di Indonesia.....	128
Penutup.....	135

KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, buku Bunga Rampai Isu-Isu Strategis Pendapatan dan Pembiayaan ini dapat diterbitkan.

Pemerintah telah menyusun pembangunan strategis jangka menengah yang termuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun 3 (tiga) dimensi utama yang menjadi target pembangunan pada periode tersebut yaitu (1) dimensi pembangunan manusia yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, perumahan dan karakter; (2) dimensi sektor unggulan yang meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, dan pariwisata; serta (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Dalam mengejar pembangunan strategis yang terangkum dalam 3 (dimensi) tersebut tentunya memerlukan pendanaan yang cukup tinggi di tiap tahunnya. Hal ini terlihat dari anggaran belanja negara yang terus mengalami kenaikan, yaitu realisasi belanja pada tahun 2015 sebesar Rp1.806,5 triliun dan meningkat tajam pada *outlook* 2018 sebesar Rp2.217,2 triliun. Sementara itu realisasi pendapatan negara pada tahun 2015 sebesar Rp1.508 triliun dan pada *outlook* 2018 mencapai Rp1.903 triliun. Tentunya kenaikan anggaran belanja tersebut perlu diiringi dengan kenaikan penerimaan negara serta sumber-sumber pembiayaan kreatif guna menopang defisit anggaran yang ada.

Pada buku ini akan membahas isu-isu strategis terkait penerimaan dan pembiayaan negara yang dapat dioptimalkan guna meningkatkan pendapatan negara serta menciptakan sumber pembiayaan yang kredibel. Adapun isu-isu yang dibahas dalam buku ini terbagi kedalam 6 (enam) bagian yaitu:

Pertama, Potensi dan Strategis Penerapan Pajak pada Sektor *e-commerce*. Pada bagian ini akan dibahas seberapa besar penerimaan negara yang akan diperoleh dari sektor *e-commerce* ini yang sudah

sangat berkembang beberapa tahun belakangan ini. Sulitnya memperoleh data dan informasi yang akurat terhadap transaksi *e-commerce* ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah khususnya Direktorat Pajak dalam mengejar penerimaan pajak dari sektor ini. Selain itu akan dibahas pula skema perpajakan untuk *e-commerce* di Indonesia serta contoh penerapannya di luar negeri. Tulisan ini juga akan memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor *e-commerce* ini.

Kedua, Kondisi Sektor Pertambangan Menjelang Satu Dekade Diberlakukan UU Minerba. Isu ini diangkat dalam buku ini mengingat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) terus mengalami penurunan. Sementara itu semangat pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat dalam pengelolaan SDA Mineral dan Batubara sangat tinggi yang terwujud dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Beberapa hal yang diatur dalam UU ini seperti pembatasan komoditi ekspor mentah, pengaturan luas wilayah pertambangan, kewajiban membangun *smelter* dan lain sebagainya justru menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan peningkatan penerimaan negara dan meningkatkan industri di sektor hilir. Oleh karenanya pada tulisan ini akan membahas bagaimana investasi, produksi dan penerimaan negara pada sektor minerba selama hampir 10 tahun UU ini diberlakukan. Apakah UU Minerba ini mampu dalam meningkatkan investasi, produksi dan penerimaan negara tersebut?. Temuan dari tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan dalam memperbaiki tata kelola dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Ketiga, Upaya dan Kendala Mewujudkan Komitmen Diversifikasi Energi Listrik Tenaga Panas Bumi Sebagai Sumber Penerimaan Negara. Topik ini diangkat dalam buku ini mengingat pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan semakin didorong ditengah kelangkaan sumber energi fosil dan untuk mewujudkan energi yang ramah lingkungan. Salah satu sumber energi terbarukan yang pemanfaatannya cukup tinggi di

Indonesia yaitu panas bumi. Hal ini dikarenakan sumber energinya yang lebih stabil dalam menghasilkan listrik dan cadangannya di Indonesia yang cukup melimpah. Penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan dari sektor inipun cukup meningkat bahkan diatas target yang ditetapkan. Namun antara potensi dan pemanfaatannya terdapat *gap* yang sangat jauh yang berdampak pada penerimaan negara yang kurang optimal. Pada tulisan ini akan diangkat kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menghambat pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia.

Keempat, Kinerja BUMN Perbankan: Tantangan Peningkatan Penerimaan Negara. Tidak dapat dipungkiri perbankan merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional dan bahkan dapat berdampak sistemik pada keuangan negara bila terjadi pemburukan arus kas bank-bank yang kemudian menghadapi kesulitan likuiditas. Pada tulisan lebih ditekankan bagaimana meningkatkan kinerja dan daya saing perbankan BUMN dalam meningkatkan penerimaan negara. Selanjutnya tulisan ini juga akan memaparkan kinerja BUMN Perbankan yang disajikan dalam beberapa indikator serta bagaimana perbandingannya dengan bank-bank di ASEAN. Kemudian diakhir tulisan akan merekomendasikan perlunya konsolidasi bank-bank BUMN untuk memperkuat kinerja perbankan BUMN itu sendiri.

Kelima, Tantangan Peningkatan Peringkat *Investment Grade* untuk Indonesia dalam Menurunkan Beban Bunga Surat Utang Negara. Terhitung sejak tahun 2017 terdapat tiga lembaga pemeringkat utang telah memberikat predikat *investment grade* pada Indonesia. Peningkatan ini diharapkan dapat menurunkan beban bunga yang dibayarkan pemerintah untuk meminimalisasi defisit keuangan negara. Hal ini terjadi di tahun 2017 tetapi memasuki 2018 telah terjadi sentimen pasar atas harapan kenaikan suku bunga The Fed, naiknya *yield US Treasury bond*, dan naiknya harga minyak dunia yang mendistorsi tren penurunan beban bunga atas *yield* obligasi pemerintah sebelumnya, dimana menyusul tekanan investor yang meminta *yield* yang tinggi. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan *yield*

yang lebih tinggi untuk sejumlah nominal tertentu pembiayaan, kendatipun telah terjadi perolehan perbaikan kinerja peringkat utang dari tiga lembaga pemeringkat terkemuka dunia. Pada tulisan ini akan membahas determinan apa saja yang dapat membentuk penurunan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) dan bagaimana upaya dalam memperbaikinya.

Keenam, Peluang Pembiayaan Berbasis Syariah untuk Pembangunan Proyek Infrastruktur di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini pembangunan infrastruktur sangat massif. Hal ini tentunya membutuhkan pendanaan yang sangat tinggi. Melihat besarnya *funding gap* pembangunan infrastruktur dan kapasitas fiskal negara yang masih terbatas, pemerintah telah menyiapkan salah satu alternatif instrumen pembiayaan yaitu berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang biasa disebut Sukuk Negara. Kedepan, instrumen pembiayaan berbasis syariah (SBSN) ini dapat menjadi andalan utama pembiayaan pembangunan di Indonesia. Tulisan ini akan membahas peluang serta kendala pada pengelolaan pembiayaan infrastruktur menggunakan SBSN.

Isu-isu yang dibahas dalam buku ini hanya sebagian isu-isu strategis terkait pendapatan dan pembiayaan negara. Diluar isu-isu ini masih banyak permasalahan mengenai pendapatan dan pembiayaan negara yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan juga anggota DPR RI. Namun demikian, buku ini diharapkan mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN khususnya dalam pendapatan dan pembiayaan negara.

Demikian pengantar tentang buku Isu-Isu Strategis Pendapatan dan Pembiayaan Negara yang diharapkan juga dapat bermanfaat bagi Anggota DPR RI sebagai bahan referensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran serta masukan guna perbaikan buku ini baik substansi maupun penyajiannya sangat kami harapkan. Akhir kata, kami

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.

Jakarta, Oktober 2018

A handwritten signature in black ink that reads "Asep AS". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath.

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si

Halaman ini sengaja dikosongkan